



KPKNL BANDAR LAMPUNG

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

KPKNL Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 13 Mei 2024
Kepala KPKNL Bandar Lampung

ditandatangani secara elektronik
Haryanto
NIP. 197208251993011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Bandar Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024
Kepala KPKNL Bandar Lampung

ditandatangani secara elektronik

Haryanto

NIP. 197208251993011001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KPKNL Bandar Lampung Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.907.163.504 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.907.163.504 atau mencapai 144,62 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp6.850.515.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.123.170.681 atau mencapai 91,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.309.727.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.959.120.058 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp848.082.574; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp20.106.565.250 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.472.234.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp782.546.926 dan Rp20.176.573.132

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.981.525.077 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.594.414.295 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp7.387.110.782, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp7.387.110.786.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp20.439.320.741, ditambah Surplus-LO sebesar Rp7.387.110.786 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp-7.649.858.395 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp20.176.573.132

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 5 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023
- 7 Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 8 Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 9 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023
- 10 Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	NERACA
LAMPIRAN	II	LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN	III	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN	IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAMPIRAN	V	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	-	27.789.717
Jumlah Aset Lancar		848.082.574	60.770.375
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.4	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.5	13.042.314.000	13.042.314.000
Peralatan dan Mesin	C.6	5.540.465.217	5.351.853.355
Gedung dan Bangunan	C.7	7.378.136.746	7.378.136.746
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.9	13.835.540	13.835.540
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.10	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(5.868.186.253)	(5.349.151.651)
Jumlah Aset Tetap		20.106.565.250	20.436.987.990
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	-	-
Aset Lain-lain	C.13	20.870.429	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(16.398.195)	-
Jumlah Aset Lainnya		4.472.234	-
JUMLAH ASET		20.959.120.058	20.497.758.365
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	782.546.926	57.061.791
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.16	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.17	-	1.375.833
Uang Muka dari KPPN	C.18	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		782.546.926	58.437.624
JUMLAH KEWAJIBAN		782.546.926	58.437.624
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	20.176.573.132	20.439.320.741
JUMLAH EKUTAS		20.176.573.132	20.439.320.741
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.959.120.058	20.497.758.365

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	9.981.525.077	6.162.944.632
Jumlah Pendapatan		9.981.525.077	6.162.944.632
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	128.671.795	57.498.353
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.127.335.719	1.028.031.900
Beban Pemeliharaan	D.6	297.686.567	322.036.137
Beban Perjalanan Dinas	D.7	524.050.300	187.748.671
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	516.722.164	516.669.587
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.9	-	-
Jumlah Beban		2.594.414.295	2.112.036.898
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		7.387.110.782	4.050.907.734
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	4	13.300.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		4	13.300.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		7.387.110.786	4.064.207.734
Pos Luar Biasa	D.13		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		7.387.110.786	4.064.207.734

Bandar Lampung, 13 Mei 2024
Kepala KPKNL Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Haryanto
NIP. 197208251993011001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	20.439.320.741	20.797.144.869
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	7.387.110.786	4.064.207.734
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	3.551.702
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	3.551.702
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	3.551.702
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(7.649.858.395)	(4.425.583.564)
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(262.747.609)	(357.824.128)
EKUITAS AKHIR	E.6	20.176.573.132	20.439.320.741

Bandar Lampung, 13 Mei 2024
Kepala KPKNL Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Haryanto
NIP. 197208251993011001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	6.850.515.000	9.907.163.504	144,62	6.167.104.216
JUMLAH PENDAPATAN		6.850.515.000	9.907.163.504	144,62	6.167.104.216
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	2.248.974.000	2.066.533.451	91,89	1.601.622.526
Belanja Modal	B.2.3	60.753.000	56.637.230	93,23	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.309.727.000	2.123.170.681	91,92	1.601.622.526

Bandar Lampung, 13 Mei 2024
Kepala KPKNL Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Haryanto
NIP. 197208251993011001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

KPKNL Bandar Lampung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

KPKNL Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Pada Tahun 2023 KPKNL Bandar Lampung memperoleh nilai kinerja organisasi sebesar 115.64

KPKNL Bandar Lampung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

KPKNL Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Pada Tahun 2023 KPKNL Bandar Lampung memperoleh nilai kinerja organisasi sebesar 115.64.

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPKNL Bandar Lampung berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset, dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi/dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Bandar Lampung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara Pengeluaran telah dipertanggungjawabkan pada saat berakhirnya periode laporan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp28.730.525

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.28.730.525 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak terdapat Bendahara Penerimaan pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp764.646.834

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp764.646.834 dan Rp22.582.908. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas sampai pada saat berakhirnya periode laporan

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp54.705.215

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp54.705.215. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan
Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1.000.000	0,5%	5.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.000.000		5.000

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp10.450.000. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp52.250. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Persediaan Rp0

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp27.789.717. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	-	27.789.717
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	-	27.789.717

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi yang baik dan disimpan dalam gudang penyimpanan

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.3 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Tidak terdapat Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
	-	-

	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
------------------	------------------------------	--------------	------------------

Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp13.042.314.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp13.042.314.000 dan Rp13.042.314.000. Tidak terdapat mutasi tambah dan/atau mutasi kurang atas Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	13.042.314.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	13.042.314.000

Adapun Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2023

No.	Luas	Lokasi	NILAI
1	641	Jl. Raden Intan No.121,Bandar Lampung	13.867.266.000
2	995	Jl. Gajah Mada, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung	5.117.086.000
Jumlah			18.984.352.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah dengan luas 641 M2 berdiri diatasnya bangunan dan saat ini digunakan sebagai kantor, sedangkan tanah dengan luas 995 M2 berdiri bangunan rumah dinas yang saat ini ditempati oleh Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Peralatan dan Mesin
Rp5.540.465.217

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp5.540.465.217 dan Rp5.351.853.355. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5.351.853.355
Mutasi tambah:	
Pembelian	56.637.230
Transfer Masuk	155.089.217
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	20.870.429
Saldo per 31 Desember 2023	5.542.709.373
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.878.714.861)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	663.994.512

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Tempat Tidur Kayu sebanyak 1 Buah	Rp	2.100.000
- Lemari Kayu sebanyak 1 Buah	Rp	2.050.000
- A.C. Split sebanyak 1 Buah	Rp	2.781.000
- Kasur/Spring Bed sebanyak 2 Buah	Rp	6.432.600
- Lemari Besi/Metal sebanyak 1 Buah	Rp	1.280.000
- CAT 6 Cable sebanyak 1 Buah	Rp	2.612.061
- Wireless Access Point sebanyak 9 Buah	Rp	110.352.000
- Switch sebanyak 1 Buah	Rp	67.553.921
- Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 1 Buah	Rp	6.000.000
- A.C. Split sebanyak 6 Buah	Rp	40.614.900
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 1 Unit	Rp	560.000.000
- Drone sebanyak 1 Buah	Rp	22.100.000
- Lap Top sebanyak 12 Buah	Rp	141.000.000
- Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 Buah	Rp	3.038.500
- A.C. Split sebanyak 1 Buah	Rp	5.596.153
- Net Book sebanyak 1 Buah	Rp	10.972.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 1 Unit	Rp	158.055.000
- Lap Top sebanyak 2 Buah	Rp	13.200.000
- Plotter (Peralatan Mainframe) sebanyak 1 Buah	Rp	32.560.000
- P.C Unit sebanyak 1 Buah	Rp	14.720.000
- Kursi Fiber Glas/Plastik sebanyak 1 Buah	Rp	3.080.000
- Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 Buah	Rp	1.380.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp7.378.136.746

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.378.136.746 dan Rp7.378.136.746. Tidak terdapat mutasi tambah dan/atau mutasi kurang karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	7.378.136.746
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	7.378.136.746
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(989.471.392)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.388.665.354

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp13.835.540

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.13.835.540 dan Rp.13.835.540. Tidak terdapat mutasi tambah dan/atau mutasi kurang karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal aset tetap lainnya.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	13.835.540
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	13.835.540
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	13.835.540

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.868.186.253

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp5.868.186.253 dan Rp5.349.151.651. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.540.465.217	(4.878.714.861)	661.750.356
2	Gedung dan Bangunan	7.378.136.746	(989.471.392)	6.388.665.354
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	13.835.540	-	13.835.540
Akumulasi Penyusutan		12.932.437.503	(5.868.186.253)	7.064.251.250

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPKNL Bandar Lampung berupa Software. Tidak terdapat aset tak berwujud pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sampai dengan berakhirnya periode laporan.

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp20.870.429 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(16.398.195)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	(16.398.195)

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp16.398.195 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Tidak terdapat akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya pada saat periode laporan berakhir.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	20.870.429	(16.398.195)	4.472.234
-	-	-	-
Total	20.870.429	(16.398.195)	4.472.234

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp782.546.926 dan Rp57.061.791. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	17.900.092	34.478.883
Total	17.900.092	34.478.883

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Beban Barang yang Masih Harus Dibayar berupa penggunaan listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp16.225.313 dan penggunaan telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp1.528.714

C.17 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.375.833. Tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal pelaporan."

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang muka dari KPPN sampai dengan berakhirnya periode laporan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran

Ekuitas
Rp20.176.573.132

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.176.573.132. dan Rp20.439.320.741. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak adanya Pendapatan Perpajakan dikarenakan pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang bersifat fungsional oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp9.981.525.077

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.981.525.077 dan Rp6.162.944.632. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 61,96 persen. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih belum membaik sehingga minat dan kemampuan masyarakat akan pelaksanaan lelang masih rendah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Jasa Lainnya	13.453.663	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	8.880.723.400	5.257.097.954,00	68,93
Jumlah	9.981.525.077	6.162.944.632	61,96

Beban Persediaan
Rp128.671.795

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128.671.795 dan Rp57.498.353.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 123,78 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	128.671.795	57.498.353	123,78
Jumlah Beban Persediaan	128.671.795,00	57.498.353	123,78

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.127.335.719 dan Rp1.028.031.900.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,66 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh adanya kenaikan alokasi pagu anggaran serta penyerapan anggaran yang optimal. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	581.915.574	579.506.915	0,42
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.440.000	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.985.700	10.839.300	1,35
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	128.666.000	133.886.000	(3,90)
Beban Barang Operasional Lainnya	40.879.600	30.250.000	35,14
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.951.600	17.078.951	(88,57)
Beban Bahan	74.506.675	11.210.250	564,63
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	63.878.500	31.365.500	103,66
Jumlah	1.127.335.719	1.028.031.900,00	9,66

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp297.686.567 dan Rp322.036.137.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2022, kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa aset baik gedung dan bangunan maupun peralatan dan mesin memerlukan perbaikan yang memadai sesuai dengan tingkat kerusakannya. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.919.353	178.937.833	(9,51)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.767.214	143.098.304	(5,12)
Jumlah	297.686.567	322.036.137	(7,56)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp524.050.300 dan Rp187.748.671.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 179,12 persen disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui tatap muka langsung ke pemangku kepentingan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	395.260.300	149.164.671	164,98
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.790.000	38.584.000	233,79
Jumlah	524.050.300,00	187.748.671	179,12

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp516.722.164 dan Rp516.669.587.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	343.831.177	357.871.072	(3,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.400.242	158.798.515	7,94
Jumah Penyusutan	516.722.164	516.669.587	0,01
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	516.722.164	516.669.587	0,01

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.11 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp4

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4 dan Rp13.300.000.

D.13 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

D.14 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp20.439.320.741,00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.20.439.320.741,00 dan Rp.20.797.144.868,69

*Surplus LO
Rp.7.387.110.786,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.387.110.786,00 dan Rp.4.064.207.734,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.551.702 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.551.702.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-7.649.858.395 dan Rp.-4.425.583.564. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.123.170.681
Diterima dari Entitas Lain	(9.907.163.504)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	134.134.428
Jumlah	(7.649.858.395)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 2.123.170.681, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 9.907.163.504

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp134.134.428 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Ekuitas Akhir
Rp20.176.573.132

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.20.176.573.132,00 dan Rp.20.439.320.740,69.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.850.515.000	6.850.515.000
Jumlah Pendapatan	6.850.515.000	6.850.515.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.248.974.000	2.248.974.000
Belanja Modal	60.753.000	60.753.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.309.727.000	2.309.727.000

Realisasi Pendapatan
Rp9.907.163.504

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.907.163.504 atau mencapai 144,62 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.850.515.000. Pendapatan KPKNL Bandar Lampung terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.907.163.504. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan perekonomian belum sepenuhnya pulih sehingga minat masyarakat atas lelang belum optimal. Adapun rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.850.515.000	9.907.163.504	144,62
Jumlah	6.850.515.000	9.907.163.504	144,62

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 60,65 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.907.163.504	6.167.104.216	60,65
Jumlah	9.907.163.504	6.167.104.216	60,65

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022, tidak terdapat penerimaan pajak karena penerimaan ini merupakan penerimaan bersifat fungsional oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp9.907.163.504

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp9.907.163.504 dan Rp6.167.104.216. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 60,65 dari TA 2022 dikarenakan perekonomian belum sepenuhnya pulih sehingga minat masyarakat atas lelang belum optimal. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	9.907.163.504	6.167.104.216	60,65
Jumlah	9.907.163.504	6.167.104.216	60,65

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	13.453.663	-	-
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	-	-	-
Jumlah	9.907.163.504	6.167.104.216	60,65

Realisasi Belanja
Rp2.123.170.681

B.2 Belanja

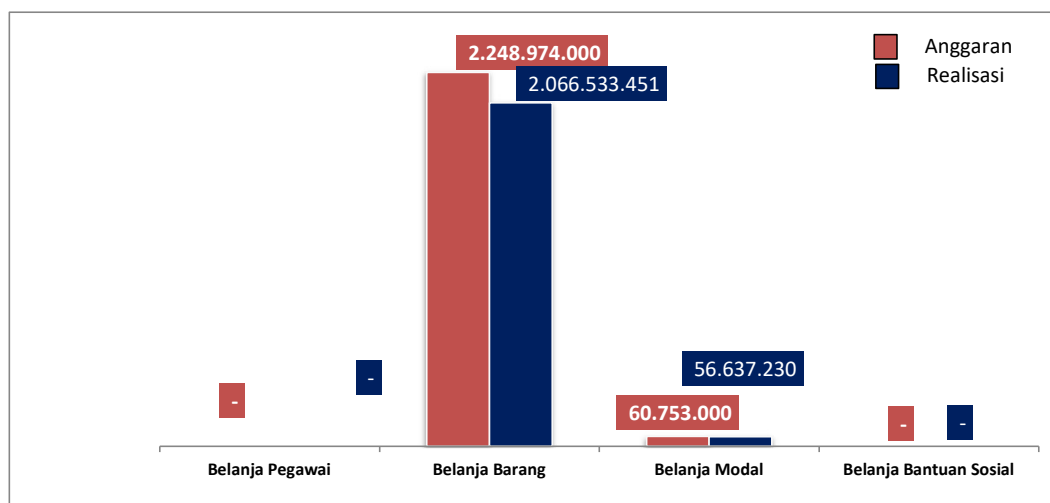
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.123.170.681 atau 91,92 % dari anggaran belanja sebesar Rp.2.309.727.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.248.974.000	2.066.533.451	91,89
Belanja Modal	60.753.000	56.637.230	93,23
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.309.727.000	2.123.170.681	91,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 32,56%, kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan alokasi anggaran belanja barang dan belanja modal pada tahun anggaran 2023 serta pelaksanaan anggaran yang optimal. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.066.533.451	1.601.622.526	29,03
Belanja Modal	56.637.230	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.123.170.681	1.601.622.526	32,56

Realisasi Belanja Pegawai Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar 0,00 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dimana pembayaran belanja pegawai dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Realisasi Belanja Barang Rp2.066.533.451

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.066.533.451 dan Rp1.601.622.526. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,03% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang pada TA 2023 dikarenakan adanya penambahan alokasi anggaran serta realisasi yang optimal selama periode laporan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	767.028.974	772.077.666	(0,65)
Belanja Barang Non Operasional	138.385.175	42.575.750	225,03
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100.882.074	81.642.470	23,57
Belanja Jasa	238.500.361	196.131.832	21,60
Belanja Pemeliharaan	297.686.567	322.036.137	(7,56)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	524.050.300	187.748.671	179,12
Jumlah Belanja Kotor	2.066.533.451	1.602.212.526	28,98
Pengembalian Belanja	-	590.000	(100,00)
Jumlah Belanja	2.066.533.451	1.601.622.526	29,03

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp24.350.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp1.951.600, hal ini disebabkan terkendalinya pandemi Covid-19. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12.000.000	1.951.600	16,26
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800.000	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.550.000	-	-
Jumlah Belanja	24.350.000	1.951.600	8,01

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp56.637.230 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya alokasi anggaran belanja modal pada tahun 2023 sedangkan tahun 2022 tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022:

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.637.230	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	56.637.230	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	56.637.230	-	-

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut tidak mengalami perubahan disebabkan oleh tidak adanya alokasi anggaran belanja modal tanah pada TA 2023 dan 2022.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya alokasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2023 namun 2022 tidak terdapat alokasi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.637.230	-	-
Jumlah Belanja Kotor	56.637.230	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	56.637.230	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat perubahan realisasi belanja TA 2023 dibandingkan Realisasi TA 2022 dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2023 dan 2022.

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut tidak mengalami perubahan karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada TA 2023 dan 2022.

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tidak terdapat perubahan realisasi anggaran karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal lainnya pada TA 2023 dan 2022.

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat perubahan realisasi anggaran karena tidak adanya alokasi anggaran belanja sosial pada TA 2023 dan 2022.

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran